

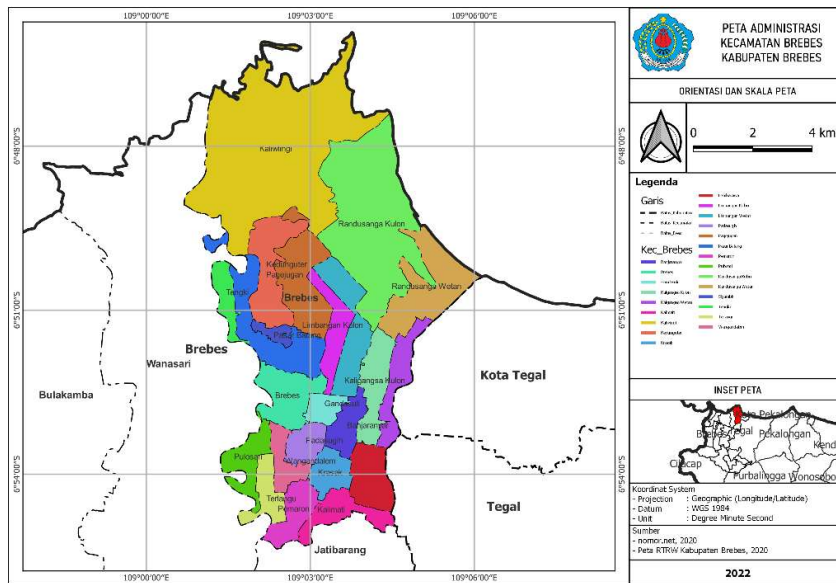
BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Brebes



Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7"- 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56,5" - 7°20'51,48" Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Brebes yaitu 1663.39 km² dengan batas wilayah laut 12 mil.

Brebes merupakan wilayah yang cukup luas di provinsi Jawa Tengah dengan sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 292 Desa dan 5 Kelurahan yang berada di wilayah pusat kota Brebes. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Brebes mempunyai topografi yang adalah 5 Kecamatan berupa daerah pesisir/Pantai, 9 Kecamatan dataran renda, dan 3 Kecamatan dataran tinggi atau pegunungan.

17 Kecamatan di wilayah Brebes meliputi Kecamatan Brebes (sebagai pusat pemerintahan), Bumiayu, Losari, Tanjung, Ketanggungan, Bulakamba, Larangan, Jatibarang, Banjarharjo, Paguyangan, Salem, Sirampog, Songgom, Wanasari, Bantarkawung, Tonjong, dan Kersana.

Secara administratif wilayah Kabupaten Brebes dibatasi oleh daratan dan juga lautan, dengan rincian batas wilayah:

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- Selatan : Wilayah Banyumas
- Barat : Wilayah Cirebon (Jawa Barat)

Jumlah penduduk di Kabupaten terus meningkat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, jumlah penduduk saat ini tercatat 1,98 juta jiwa dengan distribusi gender yang hampir seimbang antara laki-laki dan Perempuan.

2.1.2 Kondisi Demografi

a. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes diperkirakan mencapai 2.043.077 jiwa. Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu Kecamatan dengan penduduk yang paling besar yaitu 183.966 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.528 jiwa/km², sedangkan Salem adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 64.203 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 384 jiwa/km².

Dari data BPS Kabupaten Brebes bahwa secara umum rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes sebesar 1.155 jiwa/km², yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 7. Kepadatan Penduduk Kabupaten Brebes

Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
01. Salem	167,21	65.085	389
02. Bantarkawung	208,18	107.023	514
03. Bumiayu	82,09	117.198	1.428
04. Paguyangan	108,17	116.496	1.077
05. Sirampog	74,19	72.008	971
06. Tonjong	86,55	79.565	919
07. Larangan	160,25	162.997	1.017
08. Ketanggungan	153,41	146.834	957
09. Banjarharjo	161,75	132.520	819
10. Losari	91,79	143.422	1.563
11. Tanjung	72,09	108.714	1.508
12. Kersana	26,97	69.888	2.591
13. Bulakamba	120,36	186.539	1.550
14. Wanasari	75,34	167.529	2.224
15. Songgom	52,65	90.117	1.712
16. Jatibarang	36,39	87.899	2.415
17. Brebes	92,23	189.243	2.052
Jumlah	1.769,62	2.043.077	1.155

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2024

Dengan jumlah penduduk yang relative besar, Kabupaten Brebes mempunyai jumlah penduduk miskin yang relative besar. Angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 15,78 persen. Meskipun cenderung menurun dibandingkan 2022 namun, angka tersebut masih belum sesuai dengan target nasional yaitu 11 persen.

b. Struktur Penduduk

Pada pertengahan tahun 2023, populasi di Kabupaten Brebes terdiri dari 1.035.743 jiwa penduduk laki-laki dan 1.007.334 jiwa penduduk Perempuan. Jumlah ini meningkat sebanyak 32.460 jiwa dibandingkan pada tahun 2022 atau pertumbuhan penduduknya sebesar 1,28 persen.

Kabupaten Brebes memiliki populasi yang didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang berpotensi besar bagi Pembangunan ekonomi.

Tabel 8. Jumlah dan Persentasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Brebes Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Persentase Penduduk (%)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0 – 4	82.237	78.785	7,94	7,82
5 – 9	81.023	77.637	7,82	7,71
10 – 14	79.041	74.643	7,63	7,41
15 – 19	78.292	74.018	7,56	7,35
20 – 24	82.760	77.970	7,99	7,74
25 – 29	89.053	82.243	8,60	8,16
30 – 34	90.133	83.839	8,70	8,32
35 – 39	84.702	80.568	8,18	8,00
40 – 44	77.213	75.767	7,45	7,52
45 – 49	71.186	70.939	6,87	7,04
50 – 54	61.526	60.224	5,94	6,08
55 – 59	50.182	50.872	4,85	5,05
60 – 64	39.873	41.993	3,85	4,17
65 – 69	30.575	32.928	2,95	3,27
70 – 74	19.968	21.943	1,93	2,18
75+	17.979	21.965	1,74	2,18
Jumlah	1.035.743	1.007.334	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kelompok usia 30-34 tahun lebih banyak dibandingkan pada kelompok umur lainnya. Sedangkan di usia 65 tahun ke atas sudah mulai menurun.

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Pendidikan

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang besar seharusnya menjadi modal Pembangunan yang berpotensi apabila disejajarkan dengan tingkat pendidikan yang memadai. Namun, pada kenyataannya di tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Brebes hanya 6,40 tahun atau setingkat lulusan sekolah dasar saja. Sementara itu, harapan lama sekolahnya sebesar 12,44 tahun.

Jumlah siswa di jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat pada 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tertinggi yaitu pada jenjang SMP/ sederajat dengan jumlah siswa 1.547 atau sebesar 1,83 persen. Dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 9. Statistik Pendidikan di Kabupaten Brebes 2021-2023

Statistik Pendidikan	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	12,05	12,15	12,44
Rata-rat Lama Sekolah	6,22	6,35	6,40
Jumlah Siswa:	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	187.604	188.350	188.689
SMP/MTs/Sederajat	84.509	84.550	86.097
SMA/SMK/MA/Sederajat	69.253	67.292	27.725

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Secara garis besar, penduduk Kabupaten Brebes yang berusia 15 tahun ke atas, 91,43 persen sudah melek huruf. Angka tersebut meningkat 0,82 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian Angka IPM Kabupaten Brebes masih terendah di atas Kabupaten Pemalang dan Banjarnegara yaitu sebesar 69,71 persen dan menempati urutan ke-33 di Provinsi Jawa Tengah.

b. Mata Pencarian

Penduduk di Kabupaten Brebes mempunyai mata pencarian yang beragam, dengan mayoritas bekerja di sektor agraris.

Pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan dari penduduk Kabupaten Brebes. Data luas panen tanaman pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan. Pada tahun 2023 hampir seluruh komoditas tanaman pangan mengalami penurunan luas panen. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah pertanian berubah fungsi menjadi wilayah pemukiman baru.

Bawang merah merupakan komoditas paling tinggi di Kabupaten Brebes. Sepanjang tahun 2023 produksi bawang merah mencapai 2.894.956. Namun mengalami penurunan sebesar 24,55 persen dibandingkan pada tahun 2022.

Perikanan banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Brebes di wilayah pesisir seperti Kecamatan Bulakamba dan Tanjung. Banyak penduduk bekerja sebagai nelayan atau pengelola tambak terutama budidaya bandeng dan udang. Nilai produksi subsector perikanan budidaya dapat mencapai 84,63 persen, sedangkan nilai produksi perikanan laut dan perairan umum masing-masing hanya sebesar 14,39 persen dan 0,97 persen.

Peternakan yang umum dipelihara oleh penduduk di Kabupaten Brebes adalah ayam kampung, kambing dan domba. Salah satu komoditas yang unggul yaitu peternakan itu yang dapat diambil telurnya dan dijadikan telur asin sebagai salah satu produk unggulan di Kabupaten Brebes.

Perdagangan dilakukan oleh banyak penduduk kabupaten Brebes di daerah pusat kota. Laju pertumbuhan di sektor perdagangan di tahun 2023 lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,09 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Brebes juga menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan industri pengolahan.

Industri Pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes terbesar ke-2 setelah pertanian, kehutanan dan

perikanan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PDRB dasar harga berlaku pada lapangan usaha industri pengolahan selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2023 kontribusinya mencapai 10,85 triliun rupiah atau 18,83 persen terhadap PDRB Kabupaten Brebes.

Sektor Jasa merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di Kabupaten Brebes yang bekerja di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan atau dalam pemerintahan.

c. Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4,467 orang dan terdapat 199 fasilitas kesehatan yang disediakan baik dari pemerintah maupun swasta. Berikut rinciannya.

Tabel 10. Jumlah Tenaga dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2023

Tenaga dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Tenaga Kesehatan	
Tenaga Medis	539
Tenaga Keperawatan	1.703
Tenaga Kebidanan	1.377
Tenaga Kefarmasian	235
Tenaga Kesehatan Masyarakat	96
Tenaga Kesehatan Lingkungan	83
Fasilitas Kesehatan	
Rumah Sakit	14
Poliklinik	29
Puskesmas	38
Puskesmas Pembantu	62
Klinik/Balai Kesehatan	55
Polindes	251
Posyandu	1.851

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2024

Ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Brebes sudah cukup. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.043.077 jiwa, maka setiap tenaga kesehatan diperkirakan menangani sekitar 457 orang dalam setahun. Namun, jumlah kasus penyakit juga cukup banyak dan memerlukan penanganan yang cepat. Kasus penyakit diare merupakan kasus tertinggi yang mencapai 7.797 kasus, lalu TBC sebanyak 1.578 kasus dan DBD sebanyak 825 kasus.

2.2 Pemerintahan

Pemerintahan di Kabupaten Brebes dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Struktur Pemerintahan Kabupaten Brebes diatur berdasarkan sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pemerintahan Eksekutif, Pemerintahan Legislatif, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Badan/Lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi pemerintahan Kabupaten yaitu:

- a. Menyediakan pelayanan public seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur;
- b. Melaksanakan program Pembangunan berbasis potensi lokal, seperti pengembangan bawang merah dan telur asin sebagai produk unggulan daerah;
- c. Menjalankan program nasional seperti pengentasan stunting, peningkatan ekonomi desa, dan perlindungan sosial.

Dari tugas-tugas yang tersebut di atas, adapun kebijakan utama dalam pemerintahan Kabupaten Brebes yaitu peningkatan infrastruktur, pengentasan stunting dan pemanfaatan dana desa.

Visi Kabupaten Brebes di tahun 2023-2026 adalah ***“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”***. Sedangkan misi Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengalaman nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;

- d. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- e. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan Pembangunan prasarana dan sarana daerah;
- f. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2.3 Kondisi Stunting di Kabupaten Brebes

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 Kabupaten Brebes mempunyai tekad dalam penurunan angkat *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Brebes juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Tahun 2020-2024 sebagai panduan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Pelaporan dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun kepada Gubernur Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah.

Data SSGI, persentase balita stunting di Kabupaten Brebes adalah 26,3% sesuai dengan Penimbangan Serentak di Bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 13.344 balita. Di periode tahun 2021-2022 jumlah Balita dari Penimbangan Serentak Bulan Agustus berjumlah 12.130 balita sehingga mengalami penurunan kasus sebanyak 1.214 balita. Pada 2023 dari data laporan Baperlitbangda 2023 terdapat penurunan jumlah balita stunting yang cukup signifikan. Dari bulan Februari 2023 sebanyak 13.597 menurun menjadi 11.904 balita.

Tabel 11. Data Stunting di Kabupaten Brebes

No	Bulan/Tahun	Jumlah Balita
1	Februari 2020	13.469
2	Agustus 2020	13.344
3	Agustus 2021	11.825
4	Agustus 2022	12.130
5	Februari 2023	13.597
6	Agustus 2023	11.906

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023 (Laporan Baperlitbangda 2023)

Berdasarkan Penimbangan Serentak Bulan Agustus Tahun 2022 maka ditentukan lokasi prioritas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Brebes tahun 2023. Kriteria yang diambil adalah: a) Desa/Kelurahan yang mempunyai keluarga beresiko banyak; b) Desa/Kelurahan yang memiliki balita stunting dengan presentase lebih dari 20%; c) Desa/Kelurahan yang memiliki balita stunting lebih dari 100 balita; d) Desa/Kelurahan yang termasuk dalam prioritas pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dari hasil analisis terdapat 49 Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2023 dan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 050/607/2022 tentang Penetapan Desa Prioritas Penurunan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2023.

Tabel 12. Desa Prioritas Penurunan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Desa
1	Tonjong	Rajawetan, Kutayu, Purbayasa, Watujaya, Kutemendala
2	Kersana	Kemukten, Sutamaja, Limbangan, Jagapura, Kubangpari, Sindangjaya, Cigedog, Kersana
3	Tanjung	Pengaradan, Sengon
4	Salem	Gunungtajem, Gununglarang, Bentar Sari, Kadumanis
5	Brebes	Pedasugih
6	Banjarharjo	Banjarharjo, Blandongan, Bandung Sari, Penanggapan
7	Bantarkawung	Bangbayang
8	Bulakamba	Cimohong, Grinting, Kluwut
9	Bumiayu	Pruwatan, Laren, Pamijen, Bumiayu
10	Jatibarang	Jatibarang Kidul, Kertasinduyasa
11	Ketanggungan	Buara
12	Larangan	Pamulihan
13	Losari	Prapag Kidul, Negla, Jatisawit
14	Paguyangan	Cipetung, Pakujati, Wanatirta, Winduaji
15	Sirampog	Sridadi, Benda, Mendala
16	Songgom	Wanatawang
17	Wanasari	Kupu, Dumeling

Sumber: Paparan Baperlitbangda Kabupaten Brebes 2022

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan, Desa Kluwut merupakan salah satu Desa yang mempunyai prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Brebes.

Tabel 13. Data Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Brebes 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kasus	Persen (%)
1	Bulakamba	355	11,44%
2	Banjarharjo	304	9,80%
3	Tanjung	248	7,99%
4	Brebes	245	7,90%
5	Salem	209	6,74%
6	Wanasari	208	6,71%
7	Losari	194	6,25%
8	Paguyangan	193	6,22%
9	Songgom	175	5,64%
10	Bantarkawung	167	5,38%
11	Bumiayu	163	5,25%
12	Tonjong	146	4,71%
13	Jatibarang	129	4,16%
14	Larangan	108	3,48%
15	Sirampog	107	3,45%
16	Ketanggungan	107	3,45%
17	Kersana	44	1,42%

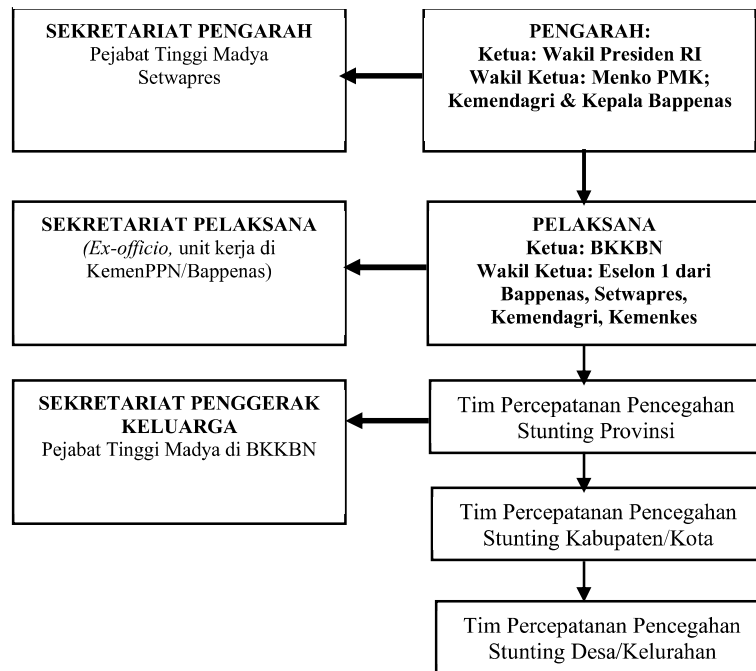
Sumber: sapulada.brebes.go.id, 2023

2.4 Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Brebes

Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini dipimpin oleh PJ Bupati tanpa didampingi oleh Wakil Bupati. Meskipun dalam Dasar Hukum Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 Wakil Bupati merupakan Ketua Tim Pelaksana.

Gambar 2.7 Kelembagaan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Perpres 72/2021



Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes

Dikarenakan saat ini posisi Wakil Bupati tidak ada, oleh karena itu untuk ketua pelaksana diberikan kepada DP3KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) sebagai Sekretariat Pelaksana Penurunan Stunting di Kabupaten Brebes.

Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Struktur TPPS Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Brebes;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Kabupaten Brebes;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Tugas Tim Pelaksana

- a. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Brebes;
- b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Kabupaten Brebes;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;

- e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- f. Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Tugas Bidang Pelayanan Spesifik dan Intervensi Sensitif

- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- d. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Tugas Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan Rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- d. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;

- e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

5. Tugas Bidang Koordinasi dan Konvergensi

- a. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah Desa, Terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
- b. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Tugas Bidang Data, Money, dan Knowledge Management

- a. Melaksanakan pengumpulan data pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementrian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan

Stunting nasional yang ada di kabupaten , seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang di butuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- d. Melakukan audit *Stunting* di kabupaten;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.